Journal of Social and Scientific Education, Vol. 3 No. 3 (2026) : 897-906 ISSN 3047-0684
Available online at: https://doi.org/10.58230/josse.v3i3.1040

Modalitas sebagai Representasi Relasi Kekuasaan Antara Jurnalis dan Presiden dalam Video "Presiden Prabowo Menjawab" di Youtube Tahun 2026

[1]Octaviani Catur Wulandari, [2]Nur Indah Sholikhati, [3]M. Riyanton

Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[1]octaviani.wulandari@mhs.unsoed.ac.id, [2]nur.indah.sholikhati@unsoed.ac.id,
[3]m.riyanton@unsoed.ac.id

ABSTRACT

The shift in political communication toward digital platforms such as YouTube has created a new space for interaction between presidents and journalists, one of which is through the program "Presiden Prabowo Menjawab", where the two parties occupy structurally unequal positions of power. Previous studies on modality in Indonesian political discourse have mainly focused on monologic speech texts, leaving studies of dialogic interactions between presidents and journalists relatively limited. This study aims to analyze modality as a representation of power relations in the video by applying the concept of modality within Norman Fairclough's textual dimension. The study employs a descriptive qualitative method, with the data consisting of modalized utterances collected through the observation and note-taking techniques. The findings show that obligation and high-certainty modality function as forms of assurance, mechanisms of accountability control, means of shifting away from concrete accountability, and mechanisms for reversing the direction of power, indicating that power relations in the discourse are dynamic and can shift between the two parties.

Keywords: Modality, Power Relations, Journalists, President

ABSTRAK

Pergeseran komunikasi politik ke platform digital seperti YouTube menciptakan ruang interaksi baru antara presiden dan jurnalis, salah satunya melalui program "Presiden Prabowo Menjawab", yang menempatkan kedua pihak pada posisi kekuasaan yang tidak setara secara struktural. Penelitian terdahulu mengenai modalitas dalam wacana politik Indonesia masih berfokus pada teks pidato monolog, sehingga kajian pada interaksi dialogis presiden-jurnalis masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis modalitas sebagai representasi relasi kekuasaan dalam video tersebut dengan menggunakan konsep modalitas pada dimensi teks Norman Fairclough. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data berupa tuturan bermodalitas yang dikumpulkan melalui metode simak dan teknik catat. Hasil menunjukkan modalitas keharusan dan kepastian tinggi berfungsi sebagai jaminan, alat kontrol akuntabilitas, sarana pengalihan dari akuntabilitas konkret, serta pembalikan arah kekuasaan, menunjukkan bahwa kekuasaan dalam wacana ini bersifat dinamis dan dapat berpindah arah.

Kata Kunci: Modalitas, Relasi Kekuasaan, Jurnalis, Presiden

Corresponding Author: [1]Octaviani Catur Wulandari - [1]octaviani.wulandari@mhs.unsoed.ac.id

How to cite : Wulandari, O. C., Sholikati, N. I., & Riyanton, M. (2026). Modalitas sebagai Representasi Relasi Kekuasaan Antara Jurnalis dan Presiden dalam Video "Presiden Prabowo Menjawab" di Youtube Tahun 2026. *Journal of Social and Scientific Education, 3*(3), 897-906. https://doi.org/10.58230/josse.v3i3.1040

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi politik di

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
*Copyright (c) 2026 **Octaviani Catur Wulandari, Nur Indah Sholikhati, M.Riyanton**

Indonesia, terutama dalam relasi antara pemimpin negara dan media. Pertumbuhan politik nasional menuju kedewasaan demokrasi turut ditunjang oleh pemanfaatan internet dan media baru, sehingga komunikasi politik kini lebih banyak dilakukan melalui media daring (Waluyo, 2019). Jika sebelumnya interaksi presiden dengan media banyak berlangsung melalui konferensi pers formal atau liputan televisi konvensional, kini platform digital seperti YouTube menjadi ruang publik baru yang memungkinkan interaksi tersebut disiarkan secara lebih terbuka, panjang, dan dapat diakses ulang oleh publik luas. Ruang digital semacam ini turut menjadi lahan baru bagi pembentukan dan kontestasi wacana politik, baik melalui unggahan resmi maupun komentar publik yang menyertainya (Fauzi, 2026), sejalan dengan pola komunikasi politik melalui media sosial yang semakin lazim digunakan pejabat dan lingkaran kepresidenan untuk menjangkau publik secara langsung (Juswil et al., 2022), yang pada gilirannya turut memengaruhi representasi sosok pemimpin dalam liputan media (Puspaningrum & Gulö, 2026).

Salah satu bentuk konkret dari pergeseran ini adalah program "Presiden Prabowo Menjawab", forum dialog terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dengan jurnalis senior, pemimpin redaksi media nasional, dan ahli pakar Indonesia. Program ini telah berlangsung dalam beberapa episode sepanjang 2025–2026, digelar di berbagai lokasi seperti kediaman Hambalang dan Padepokan Garuda. Tayangannya disiarkan melalui kanal YouTube sejumlah media besar seperti CNN Indonesia, MetroTV, dan tvOne, sehingga dapat diakses dan ditonton ulang oleh publik secara luas.

Video Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di Hambalang pada 17 Maret 2026 dan diunggah melalui kanal YouTube Najwa Shihab pada 19 Maret 2026. Video ini terdiri atas dua bagian, dengan Part 1 memperoleh 3.514.118 penayangan dan 15.856 komentar, sedangkan Part 2 memperoleh 893.763 penayangan dan 4.533 komentar. Tingginya intensitas penayangan dan interaksi pada kedua bagian video ini menjadikannya representasi yang relevan untuk mengamati bagaimana relasi kekuasaan antara jurnalis dan presiden terbentuk melalui bahasa yang digunakan. Episode ini dipilih karena melibatkan dua jurnalis sekaligus, yaitu Najwa Shihab dan Retno Pinasti, dengan cakupan topik pertanyaan yang luas, mulai dari isu hukum, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri, sehingga memungkinkan pengamatan terhadap dinamika relasi kekuasaan secara lebih kaya dibandingkan episode lain yang umumnya hanya menampilkan satu jurnalis dengan topik yang lebih terbatas. Penelitian ini menyadari bahwa pemilihan satu episode ini membatasi keterwakilan temuan terhadap keseluruhan program, mengingat episode lain dengan narasumber jurnalis dan topik yang berbeda berpotensi menampilkan dinamika relasi kekuasaan yang berbeda pula, sehingga empat pola yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak diklaim berlaku secara umum pada seluruh episode program Presiden Prabowo Menjawab.

Interaksi dalam video tersebut melibatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai narasumber serta Najwa Shihab dan Retno Pinasti sebagai jurnalis yang mengajukan pertanyaan. Kedua pihak menempati posisi yang secara struktural tidak setara. Jurnalis menjalankan fungsi *watchdog* melalui pelaporan investigatif dan pengawasan terhadap pihak yang sedang memegang kekuasaan, salah satu bentuknya tercermin dalam tren pelaporan berbasis data yang terus berkembang sebagai sarana memperkuat akuntabilitas publik (Loosen et al., 2020), tren yang turut memperkuat fungsi watchdog media arus utama secara lebih luas di tengah transformasi digital pemberitaan (Felle, 2016), sementara Presiden

memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Ketimpangan posisi antara fungsi pengawasan dan otoritas kekuasaan inilah yang berpotensi tercermin dalam pilihan linguistik, salah satunya melalui modalitas.

Modalitas merupakan salah satu fitur kebahasaan yang dapat digunakan untuk melihat posisi dan otoritas penutur dalam suatu wacana. Modalitas merupakan sikap pembicara atas keterlibatannya terhadap kebenaran proposisi tuturannya (Nugraha & Reyta, 2019). Dalam perspektif Fairclough (1989), modalitas relasional yang menyatakan kewajiban dan modalitas ekspresif yang menyatakan kebenaran dapat menunjukkan posisi penutur dalam relasi kekuasaan. Dalam analisisnya terhadap wacana Margaret Thatcher, penggunaan modalitas seperti "harus", "perlu", "wajib", dan "seharusnya" menunjukkan posisi penutur terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Bentuk modalitas tertentu juga menunjukkan tingkat kepastian terhadap suatu pernyataan. Modalitas tidak hanya menunjukkan sikap atau tingkat kepastian penutur. Penggunaannya juga berkaitan dengan pembentukan relasi kekuasaan dalam wacana.

Penelitian mengenai modalitas dalam wacana politik Indonesia telah dilakukan oleh Irwansyah et al. (2022) yang mengkaji pidato kampanye Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 dan menemukan bahwa modalitas digunakan untuk mengukuhkan serta merebut kekuasaan. Bangun et al. (2024) menemukan bahwa modalitas dalam pidato Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila digunakan untuk membangun legitimasi dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Sementara itu, Madriana & Suardana (2025) menunjukkan bahwa modalitas dalam pidato kenegaraan Joko Widodo digunakan untuk mengklarifikasi isu negatif dan mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan.

Selain kajian pada pidato kenegaraan, penelitian modalitas dalam wacana politik Indonesia juga menyasar ranah debat dan pernyataan resmi lain. Sumari (2025) melalui pendekatan berbasis korpus menemukan bahwa modalitas dalam debat presiden Indonesia didominasi oleh ungkapan keharusan dan kepastian yang digunakan kandidat untuk menegaskan komitmen kebijakan di hadapan publik. Siahaan dan Purba (2024) serta Sopha (2023) masing-masing mengkaji modalitas dalam pidato Presiden Joko Widodo dan Bacharuddin Jusuf Habibie dari perspektif linguistik fungsional sistemik dan menemukan bahwa pilihan modalitas berperan membentuk makna interpersonal sekaligus memproyeksikan otoritas kepemimpinan. Di luar konteks Indonesia, kajian wacana kritis atas konferensi pers dan pidato kepresidenan turut menegaskan bahwa pilihan linguistik, termasuk modalitas, kerap digunakan pemimpin negara untuk menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas publik dengan upaya mempertahankan otoritas, sebagaimana ditunjukkan dalam analisis konferensi pers kepresidenan (Halitović, 2026) maupun pidato pelantikan presiden (Yousfi & Mouhadjer, 2024). Relasi kekuasaan yang dibentuk melalui pilihan kebahasaan dalam interaksi juga ditemukan pada konteks nonpolitik, misalnya dalam interaksi pengajaran di kelas, yang menunjukkan bahwa dinamika serupa tidak terbatas pada wacana kenegaraan semata (Bani, 2025).

Meskipun penelitian mengenai modalitas dalam wacana politik telah banyak dilakukan, kajian yang berfokus pada modalitas dalam interaksi langsung antara Presiden dan jurnalis masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji wacana politik dalam bentuk pidato yang bersifat monolog, sedangkan interaksi Presiden dan jurnalis berlangsung secara dialogis dengan posisi dan peran yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penggunaan modalitas dalam video "Presiden Prabowo Menjawab" untuk melihat bagaimana

modalitas merepresentasikan relasi kekuasaan antara Presiden dan jurnalis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji penggunaan modalitas dalam merepresentasikan relasi kekuasaan antara Presiden dan jurnalis. Penelitian kualitatif menempatkan objek penelitian dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2023). Objek yang dikaji berupa tuturan Presiden Prabowo Subianto dan jurnalis dalam video *Presiden Prabowo Menjawab* yang diunggah pada kanal YouTube Najwa Shihab tahun 2026. Data penelitian difokuskan pada tuturan yang mengandung modalitas keharusan, kemampuan, dan kemungkinan. Ketiga kategori tersebut dipetakan ke dalam dua jenis modalitas yang dikemukakan Fairclough: modalitas keharusan dan kemampuan dikategorikan sebagai modalitas relasional karena berkaitan dengan kewajiban, izin, atau kewenangan yang mengatur hubungan antarpenutur, sedangkan modalitas kemungkinan, termasuk gradasinya hingga taraf kepastian tinggi, dikategorikan sebagai modalitas ekspresif karena merepresentasikan tingkat keyakinan penutur terhadap kebenaran proposisi yang disampaikan. Pemetaan ini digunakan sebagai jembatan antara skema pengumpulan data yang bersifat empiris dan kerangka teoretis modalitas Fairclough yang menjadi landasan analisis penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak, yaitu memperoleh data melalui kegiatan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2019). Penyimakan dilakukan terhadap tuturan dalam video tanpa keterlibatan peneliti dalam peristiwa tutur. Teknik yang digunakan meliputi teknik sadap sebagai teknik dasar, serta teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat sebagai teknik lanjutan. Tuturan yang mengandung modalitas keharusan, kemampuan, dan kemungkinan kemudian diidentifikasi dan dicatat. Data yang telah diperoleh selanjutnya ditranskripsikan dari bentuk audiovisual ke dalam teks tertulis. Hasil transkripsi digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis penggunaan modalitas sebagai representasi relasi kekuasaan antara Presiden dan jurnalis. Secara keseluruhan, proses penyimakan dan pencatatan pada kedua bagian video ini mengidentifikasi sejumlah tuturan bermodalitas yang tersebar pada ketiga kategori tersebut, dengan modalitas keharusan dan kepastian tinggi muncul paling dominan dan paling konsisten menunjukkan pola relasi kekuasaan dibandingkan modalitas kemampuan dan kemungkinan lemah. Keenam data yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan dipilih secara purposif sebagai representasi dari pola-pola yang paling menonjol, bukan sebagai keseluruhan tuturan bermodalitas yang ditemukan, sehingga gambaran frekuensi kemunculan tiap jenis modalitas secara kuantitatif pada kedua bagian video belum disajikan secara ekshaustif dalam penelitian ini dan dapat menjadi perhatian pada penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modalitas dalam interaksi antara Presiden dan jurnalis tidak hanya digunakan untuk menyatakan kepastian, keharusan, kemampuan, atau kemungkinan, tetapi juga berperan dalam membentuk relasi kekuasaan. Kekuasaan dalam interaksi ini tidak berlangsung satu arah, melainkan bergerak dan dinegosiasikan melalui bahasa yang digunakan oleh kedua pihak. Jurnalis menggunakan modalitas untuk menuntut kepastian dan komitmen Presiden,

sedangkan Presiden menggunakannya untuk memberikan jaminan, mengarahkan sikap jurnalis, atau membingkai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penggunaan modalitas tersebut menunjukkan empat pola yang merepresentasikan dinamika relasi kekuasaan antara kedua pihak. Dari ketiga kategori modalitas yang menjadi fokus pengumpulan data, yaitu keharusan, kemampuan, dan kemungkinan, modalitas kemampuan teridentifikasi dalam beberapa tuturan namun cenderung muncul dalam konteks informatif yang tidak menunjukkan pola relasi kekuasaan yang konsisten, sehingga tidak dibahas sebagai kategori tersendiri pada bagian ini. Pembahasan berikut karena itu berfokus pada pola-pola yang dibentuk oleh modalitas keharusan dan kepastian tinggi, yang secara konsisten merepresentasikan dinamika relasi kekuasaan antara Presiden dan jurnalis.

Modalitas sebagai Jaminan Atas Tuntutan Jurnalis

Presiden menggunakan modalitas kepastian untuk memberi jaminan atas suatu isu. Jaminan ini muncul baik karena diminta langsung oleh jurnalis, maupun tanpa diminta. Jurnalis tetap memegang kendali karena merekalah yang menentukan apakah jaminan tersebut cukup meyakinkan. Kepastian Presiden baru dianggap sah sebagai jaminan setelah disetujui jurnalis.

Data 1

> *Najwa Shihab: "Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Bapak menjamin itu, Pak?"*
>
> *Prabowo: "Saya menjamin."*

Modalitas kepastian "menjamin" pada pertanyaan Najwa menuntut Presiden mengonfirmasi pernyataan sebelumnya sebagai komitmen resmi. Presiden merespons dengan modalitas kepastian yang sama, "Saya menjamin," tanpa penambahan syarat atau kualifikasi apa pun. Modalitas ini bersifat performatif—pengucapannya sekaligus menghasilkan tindakan berjanji, sehingga menunjukkan tingkat kepastian tertinggi. Kedua penutur menggunakan modalitas kepastian yang sama, namun dalam fungsi berbeda: Najwa dalam bentuk interogatif untuk mengendalikan bentuk jawaban yang dituntut, sedangkan Prabowo dalam bentuk deklaratif untuk mempertegas otoritas institusionalnya sebagai satu-satunya pihak yang berwenang memberikan jaminan tersebut. Pembacaan ini tidak menutup kemungkinan interpretasi lain melalui perspektif kesantunan atau face work, sebab tuturan "Saya menjamin" yang disampaikan secara deklaratif tanpa kualifikasi juga dapat dibaca sebagai strategi membangun kedekatan atau menjaga muka Presiden di hadapan publik, sebagaimana pembacaan serupa ditemukan pada wacana interviu politik di Indonesia yang memperlihatkan bahwa pejabat publik turut mengelola citra diri melalui strategi menjaga muka di samping mempertahankan otoritas (Yafi & Maris, 2025). Penelitian ini tetap menekankan pembacaan melalui relasi kekuasaan karena posisi struktural yang tidak setara antara Presiden sebagai pemegang otoritas dan jurnalis sebagai pihak yang menuntut akuntabilitas membuat setiap bentuk kepastian yang diberikan Presiden pada dasarnya tetap berfungsi sebagai penegasan otoritas institusional, terlepas dari ada atau tidaknya motif menjaga kedekatan dengan publik.

Data 2

> *Prabowo: "Jadi percayalah saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi."*
>
> *Najwa: "Itu yang ingin kami dengar, Pak."*

Modalitas kepastian "akan" pada tuturan Prabowo menyatakan kepastian atas tindakan yang akan diambil di masa depan, sementara negasi "tidak" mengubah arah kepastian tersebut menjadi penolakan tegas untuk mengizinkan sesuatu terjadi. Modalitas ini muncul tanpa didahului tuntutan eksplisit dari jurnalis, berbeda dari pola pada data sebelumnya (Data 1) yang modalitas kepastiannya dipicu oleh pertanyaan langsung. Respons Najwa, "Itu yang ingin kami dengar, Pak," menunjukkan bahwa jurnalis tetap memegang kendali dengan memvalidasi apakah modalitas kepastian yang disampaikan Presiden telah memenuhi standar jawaban yang diinginkan. Pola ini memperlihatkan bahwa modalitas kepastian dari Presiden baru dianggap sah sebagai jaminan setelah mendapat pengakuan eksplisit dari pihak jurnalis.

Pembalikan Arah Kekuasaan (Presiden Menuntut Objektivitas Jurnalis)

Umumnya jurnalis menuntut sesuatu dari Presiden. Pola ini menunjukkan arah sebaliknya: Presiden menuntut objektivitas dari jurnalis. Modalitas keharusan dipakai Presiden untuk mengarahkan sikap jurnalis. Kekuasaan dalam wacana ini terbukti bisa berbalik arah.

Data 3

> *Prabowo: "Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus harus objektif juga ya sebagai seorang tokoh…"*

Pengulangan kata "harus" pada tuturan ini menonjolkan tuntutan yang disampaikan Presiden secara langsung kepada Najwa Shihab, yang disapa dengan nama akrab "Mbak Nana". Modalitas keharusan "harus objektif" menetapkan standar perilaku yang harus dipenuhi Najwa sebagai jurnalis, sementara frasa "sebagai seorang tokoh" mengategorikan posisi Najwa sebagai figur publik yang memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap netral. Berbeda dari pola umum interaksi presiden-jurnalis, di mana jurnalis biasanya menjadi pihak yang menuntut akuntabilitas dari presiden, pada data ini arah kekuasaan justru berbalik: Presiden mengambil posisi otoritatif untuk menilai dan mengarahkan sikap jurnalis. Modalitas "harus" di sini bukan sekadar pernyataan keharusan umum, melainkan bentuk pendisiplinan wacana, Presiden secara implisit mempertanyakan objektivitas Najwa sekaligus menetapkan kerangka bagaimana seharusnya seorang jurnalis bersikap dalam meliput isu yang berkaitan dengan dirinya.

Modalitas sebagai Tuntutan Kepastian dari Jurnalis

Jurnalis menggunakan modalitas keharusan untuk menekan Presiden memberi jawaban tegas tanpa ruang berkelit. Presiden merespons dengan mengulang kalimat yang sama persis. Pengulangan ini menunjukkan jurnalis berhasil mengendalikan bentuk jawaban Presiden. Modalitas menjadi alat kontrol jurnalis terhadap kekuasaan.

Data 4

> *Najwa: "Di luar skema BOP yang kemudian seolah-olah mengharuskan membayar itu kita sama sekali tidak ada komitmen?"*
>
> *Prabowo: "Enggak ada komitmen sama sekali."*

Modalitas keharusan "mengharuskan" pada tuturan Najwa mempersoalkan skema BOP yang berpotensi menimbulkan kewajiban finansial tersembunyi, sementara frasa "sama sekali

tidak ada komitmen?" memaksa Presiden memberi jawaban tegas tanpa ruang untuk ambiguitas. Prabowo merespons dengan mengulang persis frasa negasi tersebut, "Enggak ada komitmen sama sekali," tanpa kualifikasi tambahan. Pengulangan verbatim ini menunjukkan bahwa jurnalis berhasil mengendalikan bentuk dan batas jawaban Presiden, sementara kesediaan Presiden mengulang frasa yang sama justru memperkuat jawabannya sebagai kepastian publik yang mengikat.

Modalitas sebagai Jawaban Umum untuk Menghindari Pertanyaan Spesifik

Jurnalis mengajukan pertanyaan spesifik yang butuh jawaban jelas. Presiden tidak menjawab persoalan itu secara langsung. Presiden menggunakan modalitas kepastian untuk menyampaikan prinsip umum, membuatnya terkesan tegas tanpa benar-benar menjawab. Strategi ini membuat Presiden tetap terlihat berwibawa tanpa terikat jawaban konkret.

Data 5

> *Retno: "...Karena setahu saya ini bertentangan dengan undang-undang penyiaran yang membatasi investasi asing ini maksimal 20% dan ini masih berlaku dan juga Undang-Undang pers yang membatasi investasi asing ini hanya boleh lewat pasar modal."*
>
> *Retno: "Ini khusus antara Indonesia dengan Amerika."*
>
> *Prabowo: "Tapi begini ya saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik."*

Retno mempertanyakan pasal perjanjian dagang yang berpotensi bertentangan dengan UU Penyiaran dan UU Pers soal kepemilikan asing di sektor media. Alih-alih menjawab dengan argumen hukum yang setara, Prabowo mengalihkan jawaban ke ranah personal melalui modalitas keharusan "harus percaya", yang menuntut keyakinan lawan tutur tanpa menjelaskan pertentangan regulasi yang dipersoalkan. Kata penutup "Titik" mempertegas penolakan untuk membuka ruang argumentasi lebih lanjut. Pola ini menunjukkan bagaimana modalitas keharusan dapat digunakan Presiden untuk mengalihkan wacana dari domain akuntabilitas hukum menuju domain kepercayaan personal, sekaligus membatasi ruang jurnalis menuntut jawaban lebih lanjut.

Data 6

> *Najwa: "...saya ingin minta komitmen Bapak... Apakah Bapak akan tetap melaksanakan rekomendasi itu atau akan melihat situasi atau bagaimana, Pak?"*

Prabowo: "...yang Mana Kita Bisa Lakukan Cepat Kita Lakukan, yang Mana Kita Anggap Belum Bisa Dilakukan Ya Kita Mungkin Tunda... Tapi Bahwa Negara Butuh Lembaga-Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, yang Bersih, yang Tidak Korup, yang Penuh Integritas Itu Mutlak."

Najwa menawarkan dua pilihan jawaban yang kontras berkomitmen penuh melaksanakan rekomendasi reformasi Polri, atau "melihat situasi" sekaligus mengingatkan bahwa rekomendasi serupa kerap berhenti di atas kertas. Alih-alih memilih salah satu opsi secara eksplisit, Prabowo justru memilih opsi kedua yang lebih longgar dengan modalitas kemungkinan lemah "mungkin tunda", kemudian menutup jawabannya dengan modalitas kepastian tertinggi, "mutlak", yang diarahkan bukan pada kepastian pelaksanaan rekomendasi itu sendiri, melainkan pada prinsip umum tentang perlunya lembaga penegak hukum yang

bersih. Strategi ini memungkinkan Presiden terdengar tegas dan berkomitmen tinggi, padahal secara substansi ia memilih jalur yang tidak mengikat terhadap pertanyaan spesifik yang diajukan jurnalis. Pola ini serupa dengan pola pada Data 5, di mana kepastian modalitas dipakai pada level abstrak untuk menghindari akuntabilitas pada level konkret.

Analisis menemukan empat pola penggunaan modalitas yang merepresentasikan relasi kekuasaan antara jurnalis dan Presiden Prabowo Subianto. Keempat pola tersebut muncul dari interaksi antara Najwa Shihab, Retno Pinasti, dan Presiden Prabowo Subianto dalam video "Presiden Prabowo Menjawab". Masing-masing pola menunjukkan cara berbeda modalitas digunakan untuk membangun, menuntut, atau mengalihkan kekuasaan dalam wacana.

Pola pertama, modalitas sebagai jaminan atas tuntutan jurnalis, ditemukan pada Data 1 dan Data 2. Pada Data 1, modalitas kepastian "menjamin" muncul baik pada pertanyaan Najwa maupun jawaban Prabowo, menunjukkan bahwa jaminan Presiden baru dianggap sah setelah pertanyaan jurnalis dijawab dengan modalitas yang sama. Pada Data 2, modalitas kepastian "akan" muncul tanpa didahului tuntutan eksplisit, namun tetap divalidasi jurnalis melalui pernyataan "Itu yang ingin kami dengar, Pak."

Pola kedua, pembalikan arah kekuasaan, ditemukan pada Data 3. Pada data ini, Presiden menggunakan modalitas keharusan "harus objektif" untuk menuntut sikap tertentu dari Najwa Shihab sebagai jurnalis. Pola ini berbeda dari pola umum interaksi presiden-jurnalis, yang biasanya menempatkan jurnalis sebagai pihak yang menuntut akuntabilitas dari Presiden, bukan sebaliknya.

Pola ketiga, modalitas sebagai tuntutan kepastian dari jurnalis, ditemukan pada Data 4. Modalitas keharusan "mengharuskan" pada tuturan Najwa mempersoalkan skema BOP dan memaksa Presiden memberi jawaban tegas. Prabowo merespons dengan mengulang frasa yang sama persis, "Enggak ada komitmen sama sekali," tanpa kualifikasi tambahan.

Pola keempat, modalitas sebagai jawaban umum untuk menghindari pertanyaan spesifik, ditemukan pada Data 5 dan Data 6. Pada Data 5, modalitas keharusan "harus percaya" digunakan Presiden untuk mengalihkan jawaban dari persoalan regulasi ke ranah kepercayaan personal. Pada Data 6, modalitas kepastian "mutlak" digunakan Presiden untuk menegaskan prinsip umum, alih-alih menjawab pilihan spesifik yang ditawarkan Najwa terkait pelaksanaan rekomendasi reformasi Polri.

Secara keseluruhan, pola pertama dan ketiga menunjukkan modalitas sebagai sarana mencapai kepastian yang disepakati kedua pihak. Pola kedua menunjukkan bahwa arah kekuasaan dapat berbalik, dari yang umumnya jurnalis menuntut Presiden menjadi Presiden menuntut jurnalis. Pola keempat menunjukkan bahwa modalitas kepastian dapat dipakai pada level abstrak untuk menghindari akuntabilitas pada level konkret.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa modalitas dalam dimensi teks berperan dalam mengonstruksi relasi kekuasaan antara jurnalis dan Presiden Prabowo Subianto dalam video *Presiden Prabowo Menjawab*. Relasi tersebut terbentuk melalui empat pola penggunaan modalitas. Jurnalis menggunakan modalitas keharusan untuk menuntut kepastian dan komitmen Presiden, sedangkan Presiden menggunakan modalitas untuk memberikan jaminan, mengarahkan sikap jurnalis, dan membingkai jawaban atas pertanyaan. Presiden juga

menggunakan modalitas keharusan untuk menuntut objektivitas jurnalis sehingga menunjukkan bahwa kekuasaan dalam wacana tidak berlangsung satu arah. Relasi kekuasaan dikonstruksi secara dinamis melalui pilihan modalitas dan dapat berpindah sesuai dengan strategi kebahasaan yang digunakan kedua pihak.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Para penulis menyatakan bahwa AI generatif maupun teknologi berbantuan AI tidak digunakan dalam bentuk apa pun untuk mempersiapkan, menulis, atau menyelesaikan naskah ini. Para penulis menegaskan bahwa merekalah satu-satunya penulis artikel ini dan bertanggung jawab penuh atas isinya, sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi COPE.

PERSETUJUAN PARTISIPAN

Para penulis menyatakan bahwa persetujuan setelah penjelasan tidak diperlukan karena penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

O.C.W. bertanggung jawab atas konseptualisasi dan desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi temuan, serta penulisan draf awal naskah. N.I.S. berkontribusi dalam memberikan arahan dan masukan terkait analisis serta pengolahan data penelitian. M.R. berkontribusi dalam memberikan arahan dan masukan terkait penyusunan, pengembangan, serta penyuntingan artikel. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi final naskah untuk diterbitkan. Total persentase kontribusi untuk konseptualisasi, penyusunan, dan koreksi naskah ini adalah sebagai berikut: O.C.W. 60%, N.I.S. 20%, dan M.R. 20%.

REFERENSI

Bangun, E. B., Rahmatika, A., & Kurniawan, B. (2024). Modalitas dalam Pidato Joko Widodo pada Upacara Peringatan Hari Pancasila 2024: Linguistik Fungsional Sistemik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(7), 1–2. https://doi.org/10.62281

Bani, F. L. (2025). Analisis pragmatisme kekuasaan interaksi guru bahasa Indonesia dan siswa dalam pembelajaran di SMK-SMAK Makassar. *Manifestasi: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, *5*(3). https://ojs.unm.ac.id/manifestasi/article/view/79314

Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. Longman.

Fauzi, A. (2026). Labeling Gibran Rakabuming: Corpus-based critical discourse analysis of YouTube political comments. *Jurnal Lingua Applicata*, *9*(2), 59–74. https://doi.org/10.22146/jla.114804

Felle, T. (2016). Digital watchdogs? Data reporting and the news media's traditional "fourth estate" function. *Journalism*, *17*(1), 85–96. https://doi.org/10.1177/1464884915593246

Halitović, J. E. (2026). Press freedom vs political power: A critical analysis of linguistic impoliteness in presidential press conferences. *Anali Filološkog fakulteta*, *38*(1), 99–

116. https://doi.org/10.18485/analiff.2026.38.1.5

Irwansyah, Wagiati, Darmayanti, N., & Nur, T. (2022). Modalitas dalam Pidato Joko Widodo "Optimis Indonesia Maju" dan Prabowo Subianto "Indonesia Menang": Linguistik Fungsional Sistemik. *Jurnal Askara*, *34*(1), 73–82.

Juswil, A. K., Nofrima, S., & Saputra, H. A. (2022). Political communication patterns through social media: A case of an Indonesian presidential staff Twitter account. *CommIT (Communication and Information Technology) Journal*, *16*(2), 203–212. https://doi.org/10.21512/commit.v16i2.7889

Loosen, W., Reimer, J., & de Silva-Schmidt, F. (2020). Data-driven reporting: An on-going (r)evolution? An analysis of projects nominated for the Data Journalism Awards 2013–2016. *Journalism*, *21*(9), 1246–1263. https://doi.org/10.1177/1464884917735691

Madriana, I. G., & Suardana, I. K. (2025). Modalities in "Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2023 dalam Rangka HUT ke-78 Republik Indonesia": Systemic Functional Linguistics Perspective. *Journal of Pragmatics Research*, *7*(2), 418–436. https://doi.org/10.18326/jopr.v7i2.418-436

Mahsun. (2019). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Nugraha, D. N. S., & Reyta, F. (2019). Modalitas ganda dalam bahasa Inggris dan padanannya dalam bahasa Indonesia: Kajian sintaksis dan semantik. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, *3*(1), 138–147.

Puspaningrum, S. D., & Gulö, I. (2026). The representation of Prabowo Subianto in the Jakarta Post's 2024 presidential election coverage. *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature*, *14*(1), 773–789. https://doi.org/10.24256/ideas.v14i1.5710

Siahaan, H. V. F., & Purba, B. (2024). Modality in the text of Jokowi's speech in the context of the anniversary of political parties in Indonesia: Systemic functional linguistics study. *World Journal of English Language*, *14*(1), 46.

Sopha, D. (2023). Modality of interpersonal meaning in Bacharuddin Jusuf Habibie's speech. *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*, *8*(2), 99–103. https://doi.org/10.32696/jp2bs.v8i2.2572

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumari, B. A. D. (2025). Modality used in Indonesian presidential debate: A corpus-based political discourse study. *International Journal of English Education and Linguistics (IJoEEL)*, *7*(2), 276–287. https://doi.org/10.33650/ijoeel.v7i2.11782

Waluyo, D. (2019). Pemahaman dan Praktik Komunikasi Politik Indonesia di Era Digital. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, *2*(2), 160–167. https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.63

Yafi, M. A., & Maris, D. (2025). Managing face: A pragmatic analysis of political interview discourse in Indonesia. *Journal of Pragmatics Research*, *7*(2), 483–510. https://doi.org/10.18326/jopr.v7i2.483-510

Yousfi, A., & Mouhadjer, N. (2024). A critical discourse analysis of the inaugural speech of Trump and its perception by the American society. *Journal of Science and Knowledge Horizons*, *4*(1), 470–493. https://doi.org/10.34118/jskp.v4i01.3876